

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Infrastruktur yang memadai mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu jenis infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah adalah infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan menjadi sarana utama yang menghubungkan berbagai wilayah, mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, serta mempercepat proses pembangunan daerah (Siregar dkk., 2024).

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam rangka memperkuat konektivitas antar wilayah serta meningkatkan daya saing daerah. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam merencanakan, mengelola, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayahnya masing-masing. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal serta mampu mengelola pembangunan secara lebih efektif dan efisien (Rondinelli, 1981).

Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan anggaran,

kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selain itu, proses implementasi kebijakan seringkali tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan (Edward III, 1980).

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan infrastruktur perkotaan, khususnya infrastruktur jalan. Pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kawasan industri, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan kebutuhan terhadap infrastruktur jalan yang memadai semakin tinggi. Salah satu wilayah yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah Kecamatan Medan Marelan. Kecamatan ini memiliki posisi strategis sebagai kawasan permukiman sekaligus jalur penghubung menuju kawasan industri dan pelabuhan di wilayah utara Kota Medan.

Namun demikian, kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah Kecamatan Medan Marelan masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kerusakan jalan, genangan air saat musim hujan, serta keterlambatan perbaikan infrastruktur yang mengganggu mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut sering menimbulkan keluhan dari masyarakat karena dapat menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan kenyamanan berkendara, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, baik di tingkat desa maupun daerah.

Penelitian Saputra, Sunarto, dan Asmuni (2024), menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan masih menghadapi ketimpangan pembangunan antar wilayah akibat keterbatasan sumber daya dan koordinasi pelaksana kebijakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Cahyani, Fatchuriza, dan Rahmawati (2023) juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi.

Namun sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan atau pada tingkat desa. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas implementasi kebijakan tata kelola infrastruktur jalan di wilayah perkotaan, khususnya pada tingkat kecamatan, masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah kota dalam tata kelola infrastruktur jalan pada konteks wilayah perkotaan, khususnya di Kecamatan Medan Marelan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan melalui proses tata kelola pemerintahan, termasuk koordinasi antar lembaga pemerintah, keterlibatan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kecamatan Medan Marelan serta

memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan tata kelola pembangunan infrastruktur di Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Tata Kelola Infrastruktur Jalan di Kecamatan Medan Marelan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Medan Marelan?
- 2) Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Medan Marelan?

1.3 Fokus Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Kota Medan dalam tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Medan Marelan dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap atau komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung serta dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi infrastruktur jalan dan aktivitas masyarakat, sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan mampu diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Medan Marelan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Medan Marelan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi

masyarakat dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

3. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai implementasi kebijakan publik serta tata kelola pembangunan infrastruktur di tingkat daerah.